

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan capaian kinerja keuangan selama periode anggaran tertentu. Sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan mandat tersebut secara transparan dan akuntabel (Widiastuti et al., 2023)

Penelitian tentang laporan keuangan pemerintah sangat menarik karna organisasi public ditingkat federal dan lokal menghadapi tekanan untuk akuntabilitas yang lebih Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah masih mengandung banyak informasi yang hilang. Pelaporan keuangan pemerintah memainkan peranan penting dalam memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab secara fiskal. Meskipun lembaga pemerintahan bukanlah organisasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan laba, tetapi dalam aktivitasnya lembaga pemerintahan nyatanya melangsungkan transaksi pengeluaran serta menerima pendapatan, sehingga lembaga pemerintahan juga membutuhkan akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pemerintah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah diubah dengan mengadopsi Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penggunaan akuntansi akrual dimaksudkan untuk memperbaiki pengukuran kinerja dan memungkinkan manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel . Tujuan penerapan akuntansi akrual adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran, akuntansi, dan pelaporan. Memperbaiki administrasi perpajakan, memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa, menyediakan lebih banyak informasi sebagai pengambilan keputusan pemerintah, mereformasi sistem anggaran, dan meningkatkan transparansi dalam biaya layanan pemerintah.

Terbitnya standar akuntansi berbasis akrual telah mengukuhkan akuntansi pemerintahan menjadi disiplin ilmu yang semakin matang dan menjadi bagian tersendiri yang dapat dikaji secara terpisah dari akuntansi sektor publik. Berawal dari hal tersebut, akuntansi pemerintahan semakin banyak diminati yang ditandai dengan semakin banyak penelitian dalam bidang akuntansi pemerintahan, sehingga pengembangan akuntansi pemerintahan juga terdukung secara akademik. Laporan keuangan yang baik memerlukan pegawai yang berpengalaman dan mengetahui cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Departemen sumber daya manusia juga merupakan elemen kunci dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Menurut Schuler (1992), tujuan program pengembangan pegawai adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan fleksibilitas pegawai, meningkatkan komitmen pegawai, mengurangi ketidaksesuaian dan

ketidakhadiran. Dalam hal ini dalam mencapai kinerja yang tinggi serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan pengendalian entitas yang bersangkutan harus mendasari adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Pengelolaan keuangan harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Gubernur, bupati, walikota, menteri, dan pimpinan lembaga harus memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah dianggap berkualitas tinggi jika Sistem pengendalian internal pemerintah daerah berfungsi dengan baik. Sistem pengendalian intern yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan meningkatnya berbagai kasus penipuan, korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, pemborosan sumber daya anggaran, dan penyampaian laporan yang tidak memadai atau tidak tepat (Yusriwati dan Susanti 2022).

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi kualifikasi kualitatif . Hasil audit BPK yang tertinggi adalah Wajar dengan pengecualian (WTP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak berpendapat (TMP). Pemerintah Daerah Kota Batam telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Kepri Raih opini WTP 12 kali berturut-turut, yaitu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 sampai 2023.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Opini atas LKPD Kota Batam

Tahun	Opini
2012	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

Sumber: kepri.bpk.go.id

Pemerintah Kota Batam dinilai telah menyajikan data secara transparan, jelas, dan tepat. Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Batam bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK Kepri atas laporan keuangan pemerintah Kota Batam. Opini yang diberikan oleh pemeriksaan, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 Nomor 83.A/LHP/XVIII LTJP/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Meskipun Kota Batam telah mendapatkan WTP, dalam hasil laporan pemeriksaan LKPD Kota Batam, BPK masih menemukan kondisi dimana berkaitan dengan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan dalam perundang-undangan dalam hasil laporan pemeriksaan LKPD Kota Batam.

Badan Pemeriksa Keuangan provinsi kepri masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, antara lain: (1) Penatausahaan Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Belum Memadai; (2) Penatausahaan Rekening Pendapatan Pajak Daerah Kota Batam pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tidak Tertib; (3) Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai yang Sudah Diberhentikan pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp33.351.400,00; (4) Kekurangan Volume Sebesar Rp439.441.768,96 dan Denda Keterlambatan Belum. Dikenakan Sebesar Rp221.134.127.75 pada Delapan Paket Pekerjaan di Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : (5) Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Batam Belum Sesuai Ketentuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan standar akuntansi pemerintah pentingnya adanya sistem pengendalian internal yang mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan efisien. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat mendukung pencapaian tujuan

organisasi pemerintah tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun kurang optimalnya faktor-faktor akan kualitas laporan keuangan tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan tersebut

Kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit pemerintah daerah. Walaupun terdapat beberapa catatan atas temuan dari BPK untuk Kota Batam, namun hal tersebut dianggap terbebas dari salah saji laporan keuangan, karena Kota Batam mampu menyajikan laporan keuangannya dengan baik, meskipun masih ada kelemahan untuk dilakukan perbaikan. Sehingga berdasarkan dari temuan BPK RI tersebut akan menjadikan acuan kedepannya untuk peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik lagi untuk pemerintahan Kota Batam dan mampu mempertahankan kualitas laporan keuangannya dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika tidak adanya penanganan yang tepat, hal ini akan berdampak Menurunnya kualitas pelayanan publik, Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah, Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Potensi kerugian keuangan daerah yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengungkap lebih lanjut seberapa besar pengaruh implementasi Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi SDM, dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Bagjana & Rachman (2021) Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan SPIP pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu terdapat juga penelitian yang berbeda yaitu penelitian oleh (Rizka S et al., 2021) penelitian ini menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dengan topik serupa tidak hanya dilakukan pada instansi pemerintah, tetapi juga pada entitas bisnis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rinie, “et al. (2019) yang dilakukan pada perusahaan tekstil, menyimpulkan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi penyebab buruknya laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KOTA BATAM”**.

1.2 Identifikasi masalah

Pada uraian yang telah dijabarkan dilatar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meskipun LKPD Kota Batam mendapatkan WTP selama 12 kali berturut-turut tapi BPKRI perwakilan kepulauan riau masih menemukan kondisi dimana berkaitan dengan sistem penegendalian internal, dan ketidakpatuhan dalam perundang-undangan

2. Belum memadainya penatausahaan kas daerah pada Bendahara Umum Daerah (BUD) BPKAD Kota Batam.
3. Sistem pengendalian internal masih lemah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masih banyak yang belum dipaparkan penulis karena keterbatasan waktu, maka penulis melakukan penelitian ini hanya pada BPKAD Pemerintahan Kota Batam

1. Variabel independen yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Variabel dependen yang ditentukan adalah kualitas laporan keuangan
3. Responden penelitian ini adalah pegawai BPKAD Pemerintah Kota Batam
4. Batasan waktu penelitian 1- 6 bulan di BPKAD Pemerintahan Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah kota Batam.
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kota Batam.

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kota Batam.
4. Apakah implementasi SAP, kompetensi SDM, dan SPIP berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Batam

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Batam.
4. Untuk mengetahui implementasi SAP, kompetensi SDM, dan SPIP berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Batam.

1.6 Mamfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi pemerintahan.

2 Aspek praktis

- a. Bagi Instansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dan instansi pemerintahan pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan
- b. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan metodologi yang dapat diadaptasi atau dikembangkan untuk penelitian serupa di daerah lain.
- c. Bagi masyarakat
Membantu masyarakat memahami bagaimana aset daerah dikelola dan dilaporkan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kota Batam.